

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
DALAM PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK TAMAN
KANAK-KANAK
(Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Tongku Rahmad Harahap
NPM : 157310601**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M. Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ibu Nina Yuslimi, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, Ayah H. Lindung Harahap. S.Sos (ALM), Ibu Hj, Marlina Siregar. S.Sos. dan saudara kandung saya kakak Desi Rabayani Harahap. AMD. Kep. Dan adek saya Siti Hafisah yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk

membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca..

Pekanbaru, 20 Januari 2021
Penulis,



Tongku Rahmad Harahap



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRAC.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Manfaat	11
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Konsep Evaluasi.....	15
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	23
4. Otonomi Daerah.....	28
5. Konsep Kebijakan Sosial	31
6. Kosep Pembinaan.....	32
7. Konsep Pelatihan	34

B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikiran	38
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	40
 BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Key Informan dan Informan	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	46
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	54
 BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Dumai Barat	48
B. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai	48
C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai	50
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	52
1. Identitas Responden	52
2. Usia Responden	52
3. Pendidikan Informan.....	52
B. Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	55
1. Efektivitas	58
2. Efisiensi.....	62
3. Kecukupan	66
4. Perataan.....	70

5. Responsivitas	74
6. Ketepatan	78
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	82

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	92
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Bentuk Pembinaan terhadap Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2019	8
I.2 Jumlah Pendidik TK di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 2019 ..	9
I.3 Jumlah Tenaga Pendidik TK di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 2019.....	10
II.1 Penelitian Terdahulu	36
II.2 Operasional Variabel penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	40
III.1 Jumlah Informan.....	43
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	46
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	53
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.1 Pembagian Urusan Pemerintahan	2
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian terhadap Dinas Pendidikan Kota Dumai Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	92
2. Daftar Wawancara Penelitian terhadap Tenaga Pengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	95
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020).....	98
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir.....	102

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Tongku Rahmad Harahap
NPM : 157310601
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekapbaru, 20 Januari 2021


METERAI
TEMPEL
DITESFAH 906353214
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Tongku Rahmad Harahap

**EVALUASI TUGAS DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
DALAM PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK TAMAN
KANAK-KANAK
(Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020)**

ABSTRAK

**TONGKU RAHMAD HARAHAHAP
NPM : 157310601**

Pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak meliputi tugas guru, materi yang disampaikan dan bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid. Karena dalam pelaksanaan tugas yang baik akan terwujud hasil kinerja yang baik termasuk dalam meningkatkan pengetahuan guru pengajar Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor hambatan dalam pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Dumai Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pembinaan dan kemampuan pegawai belum memahami bentuk pembinaan terkait pembelajaran dan pengajaran yang di dasarkan kurikulum. Kesimpulan bahwa pelaksanaan Pembinaan terhadap tenaga pengajar guru Taman kanak-kanak sudah dilakukan namun belum berlangsung dengan maksimal sehingga masih adanya tenaga pengajar belum mengikuti kegiatan pembinaan. Namun penulis menyarankan menambah jumlah pegawai dalam melakukan kegiatan pembinaan, meningkatkan pengetahuan pegawai dalam melakukan kegiatan pembinaan dan meningkatkan kerjasama pegawai dengan tenaga guru pengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Pembinaan.

**EVALUATION OF THE DUTIES OF THE DUMAI CITY EDUCATION
OFFICE IN FOSTERING KINDERGARTEN EDUCATORS
(Study In West Dumai Regency 2020)**

ABSTRAC

**TONGKU RAHMAD HARAHAHAP
NPM : 157310601**

The implementation of the duties of the Dumai City Education Office in Guiding Kindergarten Educators includes teacher duties, the material presented and the form of teaching. Maximum implementation of tasks will result in good performance, including increasing teacher knowledge. The purpose of this study was to analyze and determine the inhibiting factors in the implementation of the duties of the Dumai City Education Office in Kindergarten Teacher Development in West Dumai Regency. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion on the Implementation of the Duties of the Dumai City Education Office in Fostering Kindergarten Educators has not been carried out optimally due to the lack of the number of employees in conducting coaching and the ability of employees not to understand the form of coaching related to learning and teaching based on curriculum. The conclusion is that the implementation of coaching for Kindergarten teachers has been carried out but has not developed optimally so that there are still teaching staff who have not participated in coaching activities. However, the authors suggest increasing the number of employees in conducting coaching activities, increasing employee knowledge in conducting coaching activities and increasing employee cooperation with teaching teachers in improving the quality of education.

Keywords: Evaluation, Task, Coaching.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut maka UUD RI 1945 pasal 28 C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang dasar.

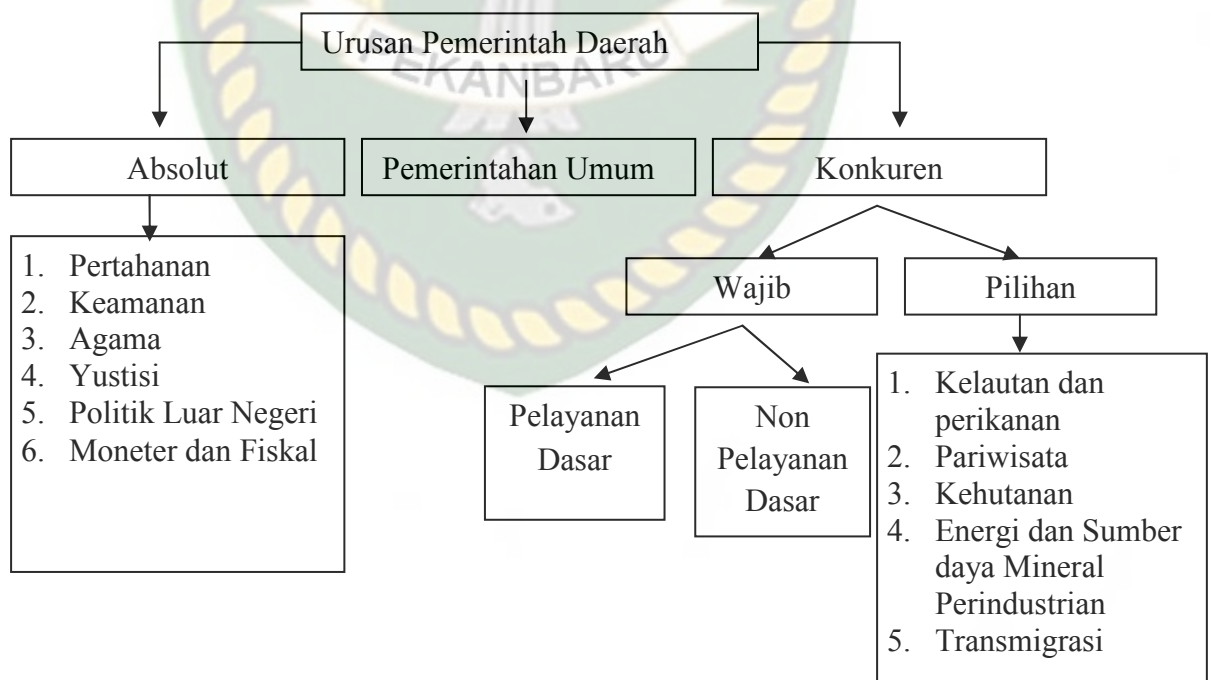
Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditegah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal (18) Ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi dan Daerah-daerah

provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar I.1: Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dimana diaktakan pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Berdasarkan urusan pemerintah daerah diatas dimana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan dimana pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat pendidikan usia Dini sampai dengan jenjang sarjana.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya, untuk itulah maka pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat tinggi ke pemerintahan tingkat rendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal terutama dalam menyediakan pelayanan pendidikan secara merata.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan adalah profesionalitas guru. Artinya pendidik tersebut merupakan seseorang yang berkompeten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik terutama terhadap pendidikan anak Usia Dini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal Pasal 28 poin (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Arti pentingnya pendidikan Usia Dini diberikan adalah untuk mengasah kemampuan anak dalam hal bermain sambil belajar yang diajarkan dalam hal pengenalan kemampuan anak di usianya dan memberikan pelatihan tanggungjawab didalam kehidupan anak dalam bidang pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran.

Pencapaian pembelajaran Perkembangan Anak melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada dimana dikatakan pada pasal 3 point c Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat, Pasal 4 (1) Kompetensi Inti PAUD merupakan

gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk:

- a. Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1);
- b. Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2);
- c. Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan
- d. Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Pembelajaran TK melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada Pasal 5 Struktur kurikulum PAUD pada memuat program-program pengembangan yang mencakup:

- a. nilai agama dan moral;
- b. fisik-motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial-emosional; dan
- f. seni.

Kompetensi profesional tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 3 ayat 7 bahwa kompetensi profesional berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Maksud dari penguasaan materi secara luas dan mendalam yaitu tenaga pendidik atau guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, serta memiliki keterampilan untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Guru sebagai tenaga pendidik TK cenderung kurang kreatif mendalami konsep-konsep proses pembelajaran hal ini guru diharapkan memiliki kemampuan professional karena tugas utamanya mengajar dan mendidik, sehingga guru harus mengetahui apa

yang harus diajarkan kepada peserta didik dan cara menyampaikan materi agar dapat diterima peserta didik sesuai dengan tahapan usia perkembangannya.

Birokrasi pemerintah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan TK secara merata yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Diketahui pelaksanaan peningkatan mutu Pendidikan di tingkat TK masih tergolong lemah hal ini perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih maksimal didalam melaksanakan tugas nya sehingga mutu Pendidikan di tingkat dasar TK dapat terwujud mulai dari pemberian pembinaan bagi tenaga pengajar pembinaan penetapan kurikulum yang digunakan dan sarana prasarana pendukung kegiatan Pendidikan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai didalam memberikan mutu pendidik bagi kegiatan pembelajaran TK melalui Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak hal ini dikatakan pada pasal 16 :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengadaan dan penyelenggaraan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.
2. Uraian tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;

- b. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan kurikulum, ketenagaan dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan administratif, verifikasi perizinan pendirian, operasional dan penutupan lembaga pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- g. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- h. menyiapkan sertifikasi pendidikan, penelitian dokumen, sebagai pertimbangan pengesahan salinan dokumen tamatan Pendidikan formal (Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan yang disamakan dengan tamatan belajar), kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. melakukan kegiatan perencanaan, evaluasi, rencana pengadaan, pengangkatan, penempatan, mutasi, kepangkatan, berkala, Daftar Kepangkatan, Daftar Pengusul Angka Kredit (DUPAK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, melakukan kegiatan pemilihan tenaga fungsional berprestasi dan berdedikasi tinggi, melakukan penyediaan sertifikasi tenaga fungsional pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- j. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi, pemantauan dan inovasi pelaksanaan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- k. melakukan pembinaan pembuatan kalender pendidikan dan Proses Belajar Mengajar serta pengendalian kurikulum pendidikan, verifikasi kurikulum dan pengujian peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- l. merencanakan kegiatan diklat bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana dan Pembina Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- m. melakukan kegiatan dan pembinaan kreatifitas peserta didik bidang ilmu pengetahuan, iman dan taqwa, olahraga dan seni sesuai dengan kapasitas peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak; dan**
- n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana dikatakan pada pasal 16 poin k Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pembuatan kalender pendidikan dan Proses Belajar Mengajar serta pengendalian kurikulum pendidikan, verifikasi kurikulum dan pengujian peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak. Kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga guru pengajar memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak menerapkan ilmu pengetahuan terhadap murid-murid.

Peran Dinas Pendidikan Kota Dumai memberikan Pembinaan dan Pelatihan yang didasarkan ketetapan peraturan yang bertujuan agar terarahnya kinerja guru pengajar TK yang memiliki wawasan pengetahuan dan potensi secara luas didasarkan kurikulum dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Dumai dari tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel I.1 : Bentuk Pembinaan terhadap Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2019

No	Pembinaan	Data Pembinaan Pelatihan			
		Jumlah Pegawai	Jumlah TK Tahun 2019	Pelaksanaan Pembinaan	
				Jadwal	2019
1	Disiplin Guru	3	11 TK	Setiap 5 Bulan	5 TK
2	Materi disampaikan	3	11 TK	Setiap 6 Bulan	5 TK
3	Kurikulum TK	3	11 TK	Setiap 5 Bulan	7 TK
4	Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid	3	11 TK	Setiap 6 Bulan	7 TK

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan penjelasan diatas Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2019 melalui bentuk Pembinaan meliputi disiplin guru, materi disampaikan, Pelatihan meliputi bentuk Kurikulum TK, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid dengan jumlah TK sebanyak 46 TK.

Tabel I.2 : Jumlah Pendidik TK di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 2019

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1	Hidayatul Mubtadiin	Jl. Simpang Latif Basilam Baru
2	TK Ratu Sima Ii	Jln.Cendana-Purnama
3	Taman Kanak-Kanak Raulia Fajar	Jl. Husni Thamrin Gang Serai No. 3
4	TK Ananda	Jl.Dermaga Gg.Merpati
5	TK Cahaya Harapan	Jl. Kenari I
6	TK Islam Al Azhar	Jl.Cermai No 3
7	TK Islam Labbaika	Jl. Pangkalan Sena No. 6 B
8	TK Islam Madani	Kmplk Btn Taman Mitra
9	TK Islam Salsabila	Jl. Paus
10	TK Islam Ternadu Aidin	Jl.Dermaga
11	TK It An-Nur	Jl. Garuda Parit Sadak

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Pendidik TK di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 2019 dimana diketahui jumlah TK sebanyak 11 satuan Pendidikan yang secara langsung dikelola oleh swasta. Tentunya hal ini Dinas Pendidikan lebih memperhatikan kegiatan pengajaran dengan tujuan meningkatkan pencapaian program Pendidikan TK yang bermutu dalam meningkatkan mutu Pendidikan Anak.

Adapun tenaga pendidik TK berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Dumai Barat di bawa ini :

Tabel I.3 : Jumlah Tenaga Pendidik TK di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 2019

No	Jumlah Tenaga Pendidik TK Kecamatan Dumai Barat				
	SMA	D2	D3	S1	Jumlah
1	8	21	29	17	74

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai, 2020

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah tenaga pendidik TK diKecamatan Dumai Barat tahun 2019 meliputi tingkat pendidikan SMA sebanyak 8 orang, Tingkat Pendidikan D2 sebanyak 21 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 29 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang dengan jumlah seluru tenaga pendidik sebanyak 74 tenaga pendidik TK. Hal ini adalah tingkat pendidikan guru pengajar disetiap Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Dumai Barat.

Berdasarkan Penjelasan diatas dimana tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai, diketahui belum terlaksana dengan maksimal dalam pembinaan guru pengajar TK, dengan kata lain masih mendapat beberapa kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga pendidik belum berjalan dengan baik, sehingga kondisi demikian mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan guru pengajar terhadap murid. Hal ini bisa dilihat dari fenomena berikut :

- a. Diketahui bahwa Dinas pendidikan Kota Dumai dinilai masih belum efektif dalam memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap guru pengajar TK dimana jumlah tenaga pegawai dalam memberikan pembinaan dan pelatihan sebanyak 12 pegawai sementara yang harus diberikan pembinaan pelatihan sebanyak 74 tenaga Pendidik sehingga belum maksimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diberikan.
- b. Diketahui bahwa kurang meratanya pembinaan pelatihan kemampuan guru pengajar TK yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Dumai, hal ini terlihat

masih belum terlaksananya pembinaan dan pelatihan disetiap tahunnya sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya potensi dan wawasan guru dalam memberikan pengajaran terhadap murid-murid, seperti pengembangan pengajaran melalui kurikulum yang ditetapkan hal ini dapat menyebabkan menurunkan minat anak untuk belajar serta menurunnya kualitas anak didalam dunia pendidikan.

- c. Diketahui belum terciptanya responsivitas secara merata oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai terhadap pembelajaran TK seperti proses belajar, kegiatan belajar, serta kedisiplinan guru pengajar sehingga dinilai belum tercermin mutu pendidikan yang berdasarkan mutu pengajar, kurikulum yang diberikan dan metode pengembangan pengajaran yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pendidikan luar sekolah belum optimal terealisasi secara optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian Skripsi ini adalah **“Bagaimanakah Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).
- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik.
2. Manfaat Teoritis Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu Pemerintahan dan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian khususnya dibidang ilmu Pemerintahan.
3. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.

- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan

kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.

4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari dimana kebijakan tersebut meliputi :

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.

5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2002;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan mitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa dengan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan

suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan

yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Untuk menilai sebuah kebijakan terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu perlu diketahui indikator penting dari sebuah evaluasi, yaitu: (Dunn: 2003: 608)

- a. Efektivitas. Berkenaan dengan apakah suatu alternative telah mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan.
- c. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Pemerataan. Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- e. Responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
- f. Ketepatan. Berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses arah tujuan kebijakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan yang terlaksana. Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Rosidin (2010;78) Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.

Menurut Arenawati (2014;93) Definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh DPRD dan pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang keberadaannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting, karena DPRD merupakan perwujudan adanya kewenangan politisi suatu daerah.² Sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif) yang melaksanakan tugas/kewajiban daerah sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2013, ;53) mengungkapkan lebih lanjut definisi pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian memberikan deskripsi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional (pusat) dan satuan pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah). Kedaulatan yang

melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi dalam satuan pemerintahan sub-nasional tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintah sub-nasional tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri

- b. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (sub-ordinat) pemerintah pusat. Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan pada atas sentralisasi belaka;
- c. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (pluralis) yang mempunyai aspirasi beragam pula (Bhineka Tunggal Ika). Aspirasi yang beragam ini perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan diwilayah provinsi dibentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.
- d. Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah.

Menurut Siswanto (2008;76) Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/ atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan ketiga asas pemerintahan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Kepastian hukum, adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Semua tindakan juga berimplikasi kepada hukum. Karena itu hukum harus dijadikan pegangan dan pedoman dalam menentukan cara berperilaku;
- b. Keadilan dan kewajaran, adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan tugas yang dilakukan harus berifat adil dan wajar secara proporsional. Adil yang dimaksud adalah suatu perlakuan yang seharusnya diberikan sesuai dengan hukum yang menaunginya dan pelayanan yang harus diberikan. Wajar yang dimaksud adalah bahwa tindakan yang dilakukan tidaklah berlebihan dan tidak juga menyepelkan;

- c. Kesamaan, adalah pelayanan yang diberikan aparat pemerintah tidaklah diskriminatif berdasarkan suka atau tidak suka. Sesuai dengan persyaratan hukum yang menaunginya maka setiap warga negara atau penduduk wajib mendapatkan suatu tindakan pelayanan yang proporsional;
- d. Permainan yang layak, adalah aturan yang diberlakukan kepada setiap warga negara mengikuti pertimbangan hukum yang wajar dan tidak memberatkan;
- e. Cermat, adalah ketelitian dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari;
- f. Keseimbangan, adalah tindakan yang dilakukan harus dilaksanakan dari berbagai segi secara sinergis sehingga tidak ada yang dirugikan;
- g. Pengharapan yang wajar, adalah imbalan yang didapat dari suatu pekerjaan sudah mempunyai ukuran yang baku;
- h. Motivasi keputusan, adalah setiap keputusan ada motivasi yang mendorongnya baik bersifat *prefentif*, *problem solving* atau pro-aktif;
- i. Kebijakan, adalah situasi dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan perlunya kemampuan untuk mengadaptasikan suatu tindakan terhadap lingkungan setempat;
- j. Penyelenggaraan kepentingan umum, adalah pelayanan pemerintah terutama ditujukan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan kelompok, golongan atau pribadi;
- k. Perlindungan atas pandangan hidup, adalah setiap warga negara mempunyai hak atas pandangan hidupnya. Pandangan hidup bangsa

haruslah diutamakan dan dibela dalam setiap tindakan aparatur pemerintah;

1. Kordinasi dan kesatuan arah, adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah haruslah ditujukan kepada satu arah yaitu tujuan negara. Pembagian kerja hanyalah merupakan suatu usaha untuk pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. Semangat pegawai (*esprit de corps*) menjunjung kebersamaan tindakan dan kesatuan arah tindakan;

Berdasarkan penjelasan diatas Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Widjaja menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Otonomi daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah

tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah. Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 396 bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:

1. Penataan Daerah;
2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
3. Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
4. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Lebih Lanjut pemerintahan Mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan

urusan yang bersekala kabupaten/kota meliputi : Perencanaan dan pengendalian, pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang.

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

5. Konsep Kebijakan Sosial

a. Defenisi kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki arti yang luas. Beberapa ahli memberikan defenisi tentang konsep kebijakan itu sendiri. Anderson dalam Solahuddin (2010; 1) berpendapat bahwa kebijakan merupakan perilaku aktor individu/ organisasi/ pemerintah maupun non pemerintah) dalam bidang kegiatan tertentu (misalnya kegiatan administratif, politik, dan ekonomis). Kemudian Dye dalam Sollahuddin (2010; 1-2) juga menerangkan tentang analisis kebijakan, yang mana menurutnya analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan public. Dalam hal ini analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, apa tujuannya, dan apa konsekuensinya.

Dye juga menyatakan beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan (Sollahuddin, 2010; 1-2), yaitu:

- 1) Menggambarkan atau memberikan titik terang mengenai kejelasan kebijakan public, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan negaranya.
- 2) Mencari dan mengkaji sebab alasan yang mendorong pemerintah menjalankan kebijakan tertentu.

- 3) Meneliti efek dari kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat. Rs. Parker dalam Sollahuddin (2010; 4) menambahkan bahwa “kebijakan public adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis”.

b. Tujuan Kebijakan Sosial

Adapun tujuan kebijakan sosial menurut Edi Suharto (2008; 62), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh factor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.
- 6) Kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara integritas dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu, melalui pembuatan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan.

6. Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut Widjaja (2001;139) adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu

pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Hidayat (2000;26) mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Memberi pengarahan
2. Memberi bimbingan
3. Melakukan pengawasan
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan
5. Memberi buku petunjuk
6. Memberi intruksi-intruksi

Pembinaan juga merupakan bantuan yang di berikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Menurut Efendi (2003;24) Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut Ismail (2001;154) mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima

dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Menurut Thoha (2000;7) pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

7. Konsep Pelatihan

Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (2008;72) sebagai “usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini: Pelatihan (*training*) adalah “sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pelatihan menurut Gary Dessler (2009;102) adalah Proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan

untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Tujuan umum pelatihan sebagai berikut : (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) *untuk mengembangkan sikap*, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan).

Sedangkan Mangkunegara (2005;67) komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan oleh Mangkunegara terdiri dari :

- 1) Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat di ukur
- 2) Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai (profesional)
- 3) Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai
- 4) Peserta pelatihan dan pengembangan (trainers) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tahapan-tahapan dalam pelatihan dan pengembangan meliputi : (1) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / need assesment; (2) menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan; (3) menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya; (4) menetapkan metode pelatihan; (5) mengadakan percobaan (try out) dan revisi; dan (6) mengimplementasikan dan mengevaluasi.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Satya Hadi Hogantara, 2015 (Skripsi)	Analisis Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Terhadap Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi dan Wawancara. 3. Objek penelitian.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Menganalisis Evaluasi 4. Hasil penelitian.
2	Faisal Yunan Siregar, 2016 (Skripsi)	Efektivitas Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.	1. Tipe Penelitian 2. Objek penelitian 3. Teknik pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Efektivitas 5. Hasil penelitian

1	2	3	4	5
3	Safri , 2016 (Skripsi)	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri hulu Di Kecamatan rengat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Penelitian 2. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 3. Teknik pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 4. Objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji Evaluasi 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
4	Rinaldi, 2017 (Skripsi)	Efektifitas Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Rokan IV Koto).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Penelitian. 2. Teknik pengumpulan data, Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif 3. Mengkaji Efektifitas 4. Lokasi penelitian. 5. Hasil penelitian
5	Dian Wati, 2017 (Skripsi)	Analisa Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Studi Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Pangkalan Kuras).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Penelitian. 2. Teknik pengumpulan data, Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan perbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian terdahulu ditetapkan 3 penelitian antara lain tahun 2015-2017 terlihat memiliki kesamaan dan tidak memiliki kesamaan si peneliti meliputi metode penelitian yang digunakan, teori yang digunakan, Teknik Analisa data dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020) sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020)



Sumber : Modifikasi Penelitian Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam penelitian ini adalah salah satu instansi pemerintah yang telah dilimpahkan kewenangan mengenai bidang pendidikan dilingkungan kerja atau wilaya hukum Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan.

2. Evaluasi Adalah penilaian hasil pelaksana kebijakan dari tahun sebelumnya dengan tujuan mengetahui kendala dan memperbaiki hasil kebijakan.
3. Pembinaan dan pelatihan dalam penelitian ini adalah pembinaan terhadap guru pengajar Taman Kanak-Kanak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan perkembangan kemajuan TK.

Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut :

4. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
5. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
6. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
7. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
9. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (appraisal) pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi di Kecamatan Dumai Barat 2020).	Efektivitas	Pembinaan penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak.
		Efisiensi	Pembinaan Tingkat Kemampuan Guru mengajar.
		Kecukupan	Pembinaan berdasarkan kurikulum.
		Perataan	Pemerataan Pembinaan erhadap tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak
		Responsivitas	Kegiatan pembinaan berdasarkan tingkat pendidikan tenaga pendidik.
		Ketepatan	Penetapan waktu kegiatan pembinaan.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, Kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Dumai dan masih ditemuinya Pendidikan TK yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran secara

layak yang didasarkan kurikulum TK dan potensi guru pengajar dengan ketetapan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Moleong 2005:87). Adapun key informan penulis adalah Bapak Sulaiman Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Key Informan dan Informan

NO	Key Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus	Sulaiman . S.Pd., M.Si	1 Orang

Sumber : Oalahan Data penelitian, 2020

	Informan		
1	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	Viana Sari. S.Pd.	1 Orang
2	Guru Pengajar TK	Yuniarti. S. Pd, Sri Wahyuni, S.Pd. Riska Susilawati.	3 Orang
Jumlah			5 Orang

Sumber : Oalahan Data penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Informan, maka untuk menentukan Key Informan, pada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus, dan informan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak dalam hal ini digunakan penarikan *Sensus* yaitu penetapan sampel secara menyeluruh dikarenakan jumlahnya sedikit.

Guru Pengajar TK, dalam hal ini digunakan penarikan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012;62).

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian yakni tentang Peran Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan dan Pelatihan Guru pengajar TK, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian

- d. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai terhadap pelaksanaan Pembinaan Guru Pendidik TK dengan mengajukan pertanyaan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah pembinaan dan pelatihan guru Pendidikan TK, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Moleong J. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar

pelaksanaan Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■																						
4	Revisi Quisioner							■	■																				
5	Rekomendasi Survy											■	■																
6	Survy Lapangan													■	■	■	■												
7	Analisis Data																	■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																					■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																												■

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Dumai Barat

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 44,98 km². Kota Dumai jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain :Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota dan .Kecamatan Dumai Selatan. Letak Kecamatan Dumai Barat tepat berada di barat Kota Dumai dengan ibu kota kecamatan Purnama

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dumai Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei. Masjid (Kecamatan Sungai Sembilan)

Kecamatan Dumai Barat terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Pangkalan Sesai.
- Kelurahan Purnama.
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan
- Kelurahan Bagan Keladi.

B. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai didalam memberikan mutu pendidik bagi kegiatan pembelajaran TK melalui Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak hal ini dikatakan pada pasal 16 :

3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengadaan dan penyelenggaraan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.
4. Uraian tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan kurikulum, ketenagaan dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan bahan administratif, verifikasi perizinan pendirian, operasional dan penutupan lembaga pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - g. melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - h. menyiapkan sertifikasi pendidikan, penelitian dokumen, sebagai pertimbangan pengesahan salinan dokumen tamatan Pendidikan formal (Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan yang disamakan dengan tamatan belajar), kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. melakukan kegiatan perencanaan, evaluasi, rencana pengadaan, pengangkatan, penempatan, mutasi, kepangkatan, berkala, Daftar

Kepangkatan, Daftar Pengusul Angka Kredit (DUPAK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, melakukan kegiatan pemilihan tenaga fungsional berprestasi dan berdedikasi tinggi, melakukan penyiapan sertifikasi tenaga fungsional pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;

- j. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi, pemantauan dan inovasi pelaksanaan kurikulum, ketenagaan, dan sarana prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- k. melakukan pembinaan pembuatan kalender pendidikan dan Proses Belajar Mengajar serta pengendalian kurikulum pendidikan, verifikasi kurikulum dan pengujian peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- l. merencanakan kegiatan diklat bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana dan Pembina Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
- m. melakukan kegiatan dan pembinaan kreatifitas peserta didik bidang ilmu pengetahuan, iman dan taqwa, olahraga dan seni sesuai dengan kapasitas peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak; dan
- n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

- a. Visi :“Mewujudkan pendidikan Kota Dumai yang bermutu, berdaya saing, dan mampu membangun insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Misi :
 1. Mewujudkan kualitas aparatur pendidik, tenaga kependidikan, dan lembaga kependidikan yang profesional guna membangun manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
 2. Mewujudkan pendidikan yang merata dan meperluas kesempatan belajar guna penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
 3. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, pelayanan prima, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, produktif, akuntabel, dan demokratis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020). Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum perempuan, karena yang berperan dalam kegiatan dan ikut serta dalam pembinaan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak sebanyak 4 orang dan laki-laki sebanyak 1 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sunardi usia 33 tahun, Armadi 34 Tahun, Jamri 35 Tahun, Hardiansyah, 37 Tahun, Hamdan 37 Tahun, Jamri 39 tahun, Sudianto 39 Tahu, Irfan Fikri 43 tahun, Rustam 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	1	20%
2	36-40	1	20%
3	41-45	1	20%
4	46-50	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 5 orang dijadikan informan sebanyak 1 orang berusia 30-35 atau 25%, 1 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau 12%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 12%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdaiikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, dan tingkat Pendidikan Pascasarjana sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Sulaiman	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus	S2
2	Viana Sari	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	S1
3	Yuniarti	Guru Pengajar TK	S1
4	Wahyuni	Guru Pengajar TK	S1
5	Riska Susilawati	Guru Pengajar TK	D3

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S2 sebanyak 1 Orang, Pendidikan S1 sebanyak 4 orang dan strata D3 sebanyak 1 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat 2020 belum terlaksana sesuai dengan peraturan dan tugas dan fungsi didalam pembinaan guru pengajar taman kanak-kanak mulai dari waktu kegiatan pembinaan, bentuk kegiatan pembinaan, dan pencapaian pelaksana pembinaan.

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisisioner dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan adalah profesionalitas guru. Artinya pendidik tersebut merupakan seseorang yang berkompeten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik terutama terhadap pendidikan anak Usia Dini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal Pasal 28 poin (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Arti pentingnya pendidikan Usia Dini diberikan adalah untuk mengasah kemampuan anak dalam hal bermain sambil belajar yang diajarkan dalam hal pengenalan kemampuan anak di usianya dan memberikan pelatihan tanggungjawab didalam kehidupan anak dalam bidang pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran.

Birokrasi pemerintah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan TK secara merata yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Diketahui pelaksanaan peningkan mutu Pendidikan di tingkat TK masih tergolong lemah hal ini perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih maksimal didalam melaksanakan tugas nya sehingga mutu Pendidikan di tingkat dasar TK

dapat terwujud mulai dari pemberian pembinaan bagi tenaga pengajar pembinaan penetapan kurikulum yang digunakan dan sarana prasarana pendukung kegiatan Pendidikan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai didalam memberikan mutu pendidik bagi kegiatan pembelajaran TK melalui Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak hal ini dikatakan pada pasal 16 poin k Dinas Pendidikan melakukan melakukan pembinaan pembuatan kalender pendidikan dan Proses Belajar Mengajar serta pengendalian kurikulum pendidikan, verifikasi kurikulum dan pengujian peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak. Kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga guru pengajar memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak menerapkan ilmu pengetahuan terhadap murid-murid.

Berdasarkan Penjelasan diatas dimana tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai, diketahui belum terlaksana dengan maksimal dalam pembinaan guru pengajar TK, dengan kata lain masih mendapat beberapa kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga pendidik belum berjalan dengan baik, sehingga kondisi demikian mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan guru pengajar terhadap murid.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan

- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam pengembangan pendidikan Taman kanak-kanak dengan melakukan pembinaan terhadap seluruh tenaga pengajar Pendidikan TK antara lain Kecamatan Dumai Barat, kegiatan pembinaan telah disusun dan ditetapkan guna tercapaian kegiatan pembinaan tepat sasaran hal ini tidak terlepas dari bentuk kegiatan pembinaan yang akan dilakukan yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap Taman kanak-kanak.

- Pembinaan Penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak

Upaya meningkatkan mutu pendidikan Taman Kanak-kanan di Kecamatan Dumai barat bahwa Dinas Pendidikan Kota Dumai menerapkan pembinaan dalam bentuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada taman kanak-kanak, hal ini dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam penerapan pembelajaran bagi taman kanak-kanak mulai dari kegiatan awal masuk dan sampai dengan selesai yang meliputi kegiatan cerita, melukis, dan bernyanyi. Adapun wawancara dengan

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan sudah kita lakukan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak yaitu bentuk kegiatan pengajaran mulai dari bentuk pengejaran awal hingga selesai meliputi kegiatan bernyanyi, melukis, dan bermain tentunya ini menjadi masukan terhadap peningkatan potensi guru mengajar (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga Pengajar taman kanak-kanak yaitu kegiatan pembinaan meliputi kegiatan bernyanyi, melukis, dan bermain mulai dari awal masuk pengajaran dan selesai kegiatan pembelajaran di sekolah.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Sejauh ini kami sudah memberikan pembinaan terhadap tenaga pengajar Taman kanak-kanak meliputi kegiatan pembelajaran mulai dari pembelajaran bernyanyi, melukis, dan bermain dengan tujuan agar guru pengajar dapat memahami bentuk pembelajaran yang akan diberikan terhadap murid, akan tetapi kami belum maksimal dalam mengadakan kegiatan pembinaan hal ini dikarenakan kurangnya pegawai secara khusus untuk melakukan pembinaan bagi setiap guru pengajara taman kanak-kanak. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga Pengajar taman kanak-kanak meliputi kegiatan pembelajaran bernyanyi, melukis, dan bermain namun hal ini diketahui belum maksimal dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pemabinaan terhadap seluruh tenaga pengajar Taman kanak-kanak.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Sejauh kami telah menerima kegiatan pembinaan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam hal kegiatan pembelajaran yang meliputi pembelajaran bermain, melukis, dan bernyanyi, namun hal ini belum dilakukan dengan maksimal terhadap setiap TK yang ada dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan pembinaan hanya dilakukan terhadap beberapa guru pengajar dikarenakan minimnya waktu kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tenaga guru pengajar taman kanak-kanak sudah diberikan pembinaan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan namun kegiatan pembinaan belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan terhadap seluruh tenaga pengajar Taman kanak-kanak di Kecamatan Dumai Barat.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Dinas pendidikan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik taman Kanak-kanak dalam bentuk kegiatan pembelajaran taman kanak-kanak namun kegiatan pembinaan belum dilakukan dengan maksimal hal ini diketahui masih ada beberapa tenaga pengajar yang belum diberikan pembinaan hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dan waktu kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar taman kanak-kanak belum dilaksanakan dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan belum diberikan terhadap seluruh

tenaga pengajar taman kanak-kanak hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan yang kami terima dari Dinas pendidikan Kota Dumai belum maksimal dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan melainkan kegiatan pembinaan hanya sekedar memberikan masukan akan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan kegiatan pembinaan belum diberikan terhadap guru pengejar secara menyeluruh hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dalam kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap guru pengajar belum dilakukan dengan maksimal dimana masih belum secara menyeluruh tenaga pengajar taman kanak-kanak diberikan pembinaan hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pembinaan.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa efektivitas kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai bahwa kegiatan pembinaan terhadap guru pengajar mulai dari kegiatan pembelajaran bernyanyi, melukis dan bermain, namun belum terlaksana dengan maksimal hal diketahui dari 11 TK yang ada hanya 5 yang diberikan pembinaan tentunya dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap jumlah guru pengajara taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Dumai Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan terhadap guru pengajar belum maksimal hal ini

dikarenakan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pembinaan terhad guru pengajara taman kanak-kanak di Kecamatan Dumai Barat.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Dalam hal ini pencapaian Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar dalam bentuk meningkatkan kemampuan guru pengajar sesuai dengan tingkat pendidikan dan materi pengajaran guru dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru pengajar dalam memberikan pembelajaran terhadap murid-murid.

- **Pembinaan Tingkat Kemampuan Guru mengajar**

Pembinaan tingkat kemampuan tenaga pendidik taman kanak-kanak oleh Dinas pendidikan Kota Dumai dengan melakukan pembinaan berdasarkan tingkat pendidikan dan kosentrasi pendidikan hal ini dilakukan diakrenakan masih banyak tenaga pengajar taman kanak-kanak belum memiliki dasar pendidikan Usui Dini melainkan berlatar pendidikan umum lainnya sehingga Dinas pendidikan memberikan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi bentuk pengajaran, materi yang disampaikan dan tat cara penyampaian materi terhadap murid-murid. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap guru pengajar TK hal ini bertujuan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar hal ini dikearenakan guru pengajar masih banyak yang memiliki tingkat

pendidikan tidak SI dan memiliki jurusan tidak linear dengan pengajaran TK yang sebenarnya tingkat pendidikan PAUD yang sesuai dengan pengajaran di TK, tentu kami bertugas dalam melakukan pembinaan terhadap setiap guru pengajar yang ada. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan sejauh ini Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga Pengajar taman kanak-kanak dalam meningkatkan kemampuan yang didasarkan tingkat pendidikan guru mengajar hal ini dikarenakan masih ditemuinya guru pengajar tidak berdasarkan latar belakang pendidikan PAUD melainkan pendidikan umum lainnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Kami melakukan pembinaan terhadap guru pengajar dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru pengajar dalam bentuk kegiatan pengajaran, materi yang disampaikan dan bentuk pengejaran kedekatan dengan murid. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum berlatar belakang Pendidikan PAUD sehingga perlunya pembinaan yang serius bagi guru pengajar.. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pegawai sudah melakukan pembinaan terhadap guru pengajar dalam bentuk peningkatan kemampuan guru pengajar dalam bentuk kegiatan pembelajaran, materi yang disampaikan dan kedekatan dengan murid-murid.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Sejauh kami telah menerima kegiatan pembinaan yang diberikan langsung oleh pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai mulai dari kegiatan pembelajaran, pemberian materi pembelajaran, dan cara kedekatan dengan Murid, namun hal ini belum dilakukan secara merata terhadap guru pengajar melainkan hanya sebagian guru yang diberikan pembinaan sehingga guru hanya melakukan pengajaran seperti biasanya. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai belum memberikan pembinaan terhadap guru pengajar secara menyeluruh melainkan hanya beberapa guru pengajar saja sehingga guru memberikan pengajaran terhadap murid dilakukan seperti biasanya.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas pendidikan Kota Dumai belum maksimal memberikan pembinaan akan kegiatan pembelajaran guru hal ini diketahui kegiatan pembinaan selayaknya dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan guru pengajar melainkan kenyataannya kegiatan pembinaan disama ratakan terhadap guru pengajar yang seharusnya guru berlatar pendidikan PAUD tidak diberikan pembinaan sama dengan berlatar pendidikan umum lainnya, sehingga belum memberikan peningkatan kemampuan guru pengajar terutama guru yang berlatar pendidikan PAUD. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar belum dilaksanakan dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan dilaksanakan secara serentak terhadap guru pengajar melainkan tidak berdasarkan tingkat pendidikan sehingga terlihat belum memaksimalkan peningkatan kemampuan guru pengajar.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Kegiatan pendidikan yang kami terima belum maksimal dimana kegiatan pembinaan yang sebenarnya dilakukan perkuota namun hal ini dilakukan secara bersamaan terhadap guru pengajar TK, sehingga kurang maksimalnya kegiatan pembinaan yang diberikan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar TK melainkan kegiatan yang dilakukan seperti seminar saja tentu hal ini tidak berdampak terhadap peningkatan kemampuan guru pengajar. Kegiatan pembinaan yang kami terima dari Dinas pendidikan Kota Dumai. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap guru pengajar masih dilakukan serentak terhadap guru pengajar TK yang selaknya dilakukan per kuota sehingga kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan maksimal terhadap guru dalam meningkatkan kemampuan pengajaran.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai bahwa meliputi kegiatan pembelajaran, pemberian materi terhadap murid, dan bentuk kedekatan guru terhadap murid-murid, namun kenyataannya kegiatan pembinaan dalam peningkatan mutu pengajar belum dilakukan dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan tidak didasarkan latar pendidikan guru melainkan pembinaan dilakukan dengan serentak sementara guru pengajar berlatarkan pendidikan yang berbeda dan kegiatan pembinaan belum diadakan berdasarkan kuota atau pembagian jadwal sehingga memadai guru untuk diberikan pembinaan melainkan dilakukan secara serentak sehingga kegiatan pembinaan seperti seminar saja sehingga guru pengajar belum menerima kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar bahwa Dinas Pendidikan kota dumai belum maksimal didalam pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak hal ini diketahui pemberian pembinaan dalam meningkatkan pengetahuan pengajaran guru pengajar belum berdarkan tingkat pendidikan guru pengajar melainkan pemberian pembinaan secara serentak diberikan sementara guru pengajar sebagian berlataran pendidkan PAUD dan pendidikan umum lainnya yang seharusnya pembinaan dilakukan secara berbeda berdasarkan latar pendidikan guru dan kegiatan pembinaan belum dilakukan per kuota melainkan dilakukan secara serentak sehingga kegiatan pembinaan belum dirasakan terlaksana dengan maksimal.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Tentunya kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota pekanbaru dalam pembinaan tenaga guru mengajar sangat penting dalam kemajuan mutu pendidikan Taman kanak-kanak, kerjasama yang dilakukan pegawai tidak terlepas dari koordinasi dan bentuk kegiatan pembinaan dan evaluasi akan kegiatan pembinaan sehingga kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kegiatan dan bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan.

- Kerjasama Pegawai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak
Kerjasama pegawai adalah salah satu pencapaian kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak dimana atasan berkoordinasi dengan bawahan dan bawahan saling mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan. Pelaksanaan kerjasama pegawai dalam kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak dilaksanakan mulai dari perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan, serta evaluasi akan bentuk pembinaan yang dilaksanakan. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Sejauh ini kami sebagai pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah melakukan kerjasama dalam pencapaian kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak kerjasama yang kami lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, namun saya sadari sebagai atasan kerjasama yang kami lakukan belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus dilapangan dan memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan dalam bidang pengajaran sehingga kegiatan pembinaan belum terlaksana dengan maksimal. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan sejauh ini kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah terlaksana namun belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai terutama didalam melakukan pembinaan pengajaran terhadap kurang pengajar taman kanak-kanak sehingga dirasakan belum maksimalnya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Kami dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap guru pengajar TK sudah melakukan kerjasama sesama pegawai sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan namun harus kami akui kurangnya jumlah pegawai terutama secara khusus dalam melakukan pembinaan pengajara sehingga hal inilah yang membuat kurang maksimalnya kerjasam yang kami lakukan karena harus melakukan tugas bagian-bagian lainnya. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan tenaga pengajar Taman kanak-kanak sudah terlaksanan namun masih kurangnya jumlah pegawai terutama dilapangan dalam memberikan pembinaan dalam bentuk pengajaran sementara pegawai memiliki tugasnya masing-masing.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Sejauh pelaksanaan pembinaan yang kami terima yang diberikan pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa belum maksimal dimana belum terlihat kerjasama yang dilakuakn didalam kegiatan pembinaan hal ini terlihat dari bentuk kegiatan yang diberikan terlihat belum tepat sasaran dalam pembinaan bentuk pengajaran yang akan dilakukan guru terhdap murid tentunya hal ini di iringi dengan kurangnya jumlah pegawai sehingga terlihat kerjasama yang terjalin kurang saling mendukung antara sema pegawai. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama antar pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai belum memberikan kemaksimalan dalam kegiatan pembinaan yag diberikan hal ini terlihat bahwa kurangnya jumlah pegawai didalam kegiatan pembinan dikarenakan melakukan tugas lainnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Kerjasama yang dilakukan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai belum maksimal dimana dalam kegiatan pembinaan terlihat pegawai sangat sedikit dalam melaksanakan pembinaan yaitu sebanyak 3 orang sementara pembinaan yang akan diberikan terhadap guru pengajar sangat banyak sehingga memberikan kesan kurangnya kerjasama pegawai yang diberikan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan melalui kerjasama pegawai belum memberikan kegiatan pembinaan dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan yaitu sebanyak 3 orang sehingga kegiatan pembinaan kurang maksimal dirasakan guru pengajar taman kanak-kanak.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak belum maksimal dimana kegiatan pembinaan yang dilaksanakan masih kurangnya jumlah pegawai dalam kegiatan pembinaan sementara banyak guru pengajar yang harus diberikan pembinaan sehingga terkesan kegiatan pembinaan hanya dilakukan formalitas aja melainkan tidak fokus pada kegiatan pembinaan yang diberikan yang didasarkan jumlah pegawai dan kemampuan pegawai dalam memberikan kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kerjasama pegawai dalam kegiatan pembinaan yang diberikan belum terlihat maksimal dimana kegiatan pembinaan hanya dilakukan 3 pegawai sementara guru yang akan diberikan pembinaan terdapat dari beberapa sekolah, sehingga kegiatan pembinaan kurang maksimal.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa kegiatan kerjasama dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai belum

maksimal dimana belum terjalannya kerjasama pegawai akan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dimana diketahui pegawai didalam melakukan pembinaan hanya 3 orang sementara jumlah TK yang ada sangat bayak dan pegawai banyak yang melaksanakan tugas lain, sehingga tidak memfokuskan akan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kerjasama pegawai Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak belum terlaksana dengan maksimal hal ini terlihat dari bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksnakan bahwa pegawai terdap hanya 3 orang dialam melakukan kegiatan pembinaan dan diketahui pegawai tersebut belum memiliki kemampuan didalam pembinaan akan bentuk pengajaran yang akan dilakukan oleh guru pengajar sehingga berkesan bahwa kegiatan pembinaan hanya formalitas saja, dan belum memberikan pencapaian akan kemampuan tenaga guru pengajar.

4. Perataan

Perataan merupakan pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kota dumai tidak terlepas dari kegiatan pemerataan akan pembinaan yang diberikan tentu hal ini bertujuan agar seluruh guru pengajar taman kanak-kanak memiliki pengetahuan kemampuan dalam bentuk kegiatan pengajaran terhadap siswa.

- Pemerataan Pembinaan terhadap tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak

Pemerataan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Dumai tidak terlepas dari pemberian pembinaan secara merata dimana dari 11 jumlah TK diberikan pembinaan dengan tujuan agar tercapainya mutu pendidikan taman kanak-kanak melalui tenaga pengajar taman kanak-kanak. kegiatan pembinaan dilakukan 2 kali dalam setahun tentunya memberikan pencapaian kemampuan tenaga pengajar taman kanak-kanak lebih memahami bentuk pembelajaran dan kegiatan pengajaran yang diberikan terhadap murid-murid. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Kami sudah melakukan pembinaan terhadap Tk yang ada dengan melakukan kegiatan pembinaan sebanyak 2 kali dalam setahun yang meliputi bentuk Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid hal ini bertujuan agar lebih maksimalnya kemampuan guru pengajar dalam kegiatan pembelajaran terhadap murid-murid. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas pendidikan sudah melakukan kegiatan pembinaan secara merata terhadap Sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Dumai barat. Kegiatan pembinaan sebanyak 2 kali dalam setahun yang meliputi bentuk Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Kegiatan pembinaan sudah kami laksanakan dengan melakukan pembinaan meliputi kegiatan pembinaan sebanyak 2 kali dalam setahun yang meliputi bentuk Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid. Memang kami harus menyadari bahwa kegiatan pembinaan belum dihadiri semua guru pengajar TK dikarenakan kami tidak mengundang secara menyeluruh TK yang ada melainkan TK yang masih belum memiliki akreditasi dan perlunya pemberian pembinaan. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan belum dilakukan secara merata melainkan pembinaan yang diberikan mengutamakan Taman kanak-kanak yang belum memiliki akreditasi atau sekolah yang perlunya diberikan pembinaan dikarenakan kurang berkembang.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Pemerataan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai terhadap rumah Sekolah taman kanak-kanak belum dilakukan secara merata hal ini dimana diketahui masih banyak taman kanak-kanak yang belum mengikuti kegiatan pembinaan melainkan adanya penetapan dari dinas Pendidikan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum terlaksananya pemerataan pembinaan yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kota Dumai hal ini pembinaan yang diberikan hanya beberapa taman kanak-kanak berdasarkan ketetapan dinas pendidikan Kota Dumai saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas pendidikan belum melakukan pemerataan kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar TK dimana sebagian TK belum

menerima kegiatan pembinaan melainkan atas ketetapan Dinas Pendidikan saja. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemerataan kegiatan pembinaan belum dilaksanakan Dinas pendidikan Kota Dumai hal ini terlihat masih banyak TK yang belum diberikan pembinaan sehingga belum memberikan peningkatan kemampuan tenaga pengajar Taman kanak-kanak secara merata.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Sejauh ini kegiatan yang diberikan Dinas Pendidikan dalam pembinaan belum dilaksanakan secara merata terhadap TK yang ada melainkan hanya beberapa TK saja yang diberikan pembinaan sehingga sebagian TK belum menerima kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dalam kegiatan pembelajaran. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum dilaksanakan oleh dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan secara merata melainkan hanya diberikan pembinaan terhadap beberapa sekolah saja.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa pemerataan kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap guru pengajar hal ini dimana diketahui dari 11 taman kanak-kanak yang menerima pembinaan hanya sekitar 5 taman kanak-kanak saja sehingga hal ini belum memberikan pencapaian dalam peningkatan mutu kemampuan pengajaran terhadap guru pengajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar belum dilaksanakan denganmaksimal terhadap seluruh tenaga pengajar melainkan beberapa guru saja hal ini dikarenakan Dinas pendidikan Kota Dumai mengutamakan Sekolah Taman kanak-kanak yang belum memiliki akreditasi atau TK yang masih tertinggal dalam mutu pengajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan Dinas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan Taman kanak-kanak dengan menetapkan kegiatan pembinaan yang meliputi Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid hal ini bertujuan agar kemampuan guru dapat meningkat dan memberikan peningkatan mutu pendidikan terhadap murid-murid.

- Kegiatan Pembinaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik

Kegiatan pembinaan didasarkan tingkat pendidikan guru pengajar dengan upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pengajaran dan sesuai dengan pengetahuan penerapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap guru pengajar TK berdasarkan tingkat pendidikan tingkat pendidikan S1 dan memiliki jurusan tidak linear dengan pengajaran TK yang sebenarnya tingkat pendidikan

PAUD yang sesuai dengan pengajaran di TK, tentu kami bertugas dalam melakukan pembinaan terhadap setiap guru pengajar yang ada. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan sejauh ini Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga Pengajar taman kanak-kanak dalam meningkatkan kemampuan yang didasarkan tingkat pendidikan guru mengajar hal ini dikarenakan masih ditemuinya guru pengajar tidak berdasarkan latar belakang pendidikan PAUD melainkan pendidikan umum lainnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Kami melakukan pembinaan terhadap guru pengajar dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru pengajar dalam bentuk kegiatan pengajaran, materi yang disampaikan dan bentuk pengejaran kedekatan dengan murid. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum berlatar belakang Pendidikan PAUD sehingga perlunya pembinaan yang serius bagi guru pengajar.. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pegawai sudah melakukan pembinaan terhadap guru pengajar dalam bentuk peningkatan kemampuan guru pengajar dalam bentuk kegiatan pembelajaran, materi yang disampaikan dan kedekatan dengan murid-murid.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Sejauh kami telah menerima kegiatan pembinaan yang diberikan langsung oleh pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai mulai dari kegiatan pembelajaran, pemberian materi pembelajaran, dan cara kedekatan dengan Murid, namun hal ini belum dilakukan secara merata terhadap guru pengajar melainkan hanya sebagian guru yang diberikan pembinaan sehingga guru hanya melakukan pengajaran seperti biasanya. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai belum memberikan pembinaan terhadap guru pengajar secara menyeluruh melainkan hanya beberapa guru pengajar saja sehingga guru memberikan pengajaran terhadap murid dilakukan seperti biasanya.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas pendidikan Kota Dumai belum maksimal memberikan pembinaan akan kegiatan pembelajaran guru hal ini diketahui kegiatan pembinaan selayaknya dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan guru pengajar melainkan kenyataannya kegiatan pembinaan disama ratakan terhadap guru pengajar yang seharusnya guru berlatar pendidikan PAUD tidak diberikan pembinaan sama dengan berlatar pendidikan umum lainnya, sehingga belum memberikan peningkatan kemampuan guru pengajar terutama guru yang berlatar pendidikan PAUD. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar belum dilaksanakan dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan dilaksanakan secara serentak terhadap guru pengajar melainkan tidak berdasarkan tingkat pendidikan sehingga terlihat belum memaksimalkan peningkatan kemampuan guru pengajar.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Kegiatan pendidikan yang kami terima belum maksimal dimana kegiatan pembinaan yang sebenarnya dilakukan perkuota namun hal ini dilakukan secara bersamaan terhadap guru pengajar TK, sehingga kurang maksimalnya kegiatan pembinaan yang diberikan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar TK melainkan kegiatan yang dilakukan seperti seminar saja tentu hal ini tidak berdampak terhadap peningkatan kemampuan guru pengajar. Kegiatan pembinaan yang kami terima dari Dinas pendidikan Kota Dumai. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap guru pengajar masih dilakukan serentak terhadap guru pengajar TK yang selaknya dilakukan per kuota sehingga kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan maksimal terhadap guru dalam meningkatkan kemampuan pengajaran.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai bahwa meliputi kegiatan pembelajaran, pemberian materi terhadap murid, dan bentuk kedekatan guru terhadap murid-murid, namun kenyataannya kegiatan pembinaan dalam peningkatan mutu pengajar belum dilakukan dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan tidak didasarkan latar pendidikan guru melainkan pembinaan dilakukan dengan serentak sementara guru pengajar berlatarkan pendidikan yang berbeda dan kegiatan pembinaan belum diadakan berdasarkan kuota guru atau pembagian jadwal sehingga memadai guru untuk diberikan pembinaan melainkan dilakukan secara serentak sehingga kegiatan pembinaan seperti seminar saja sehingga guru pengajar belum menerima kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan guru pengajar bahwa Dinas Pendidikan Kota Dumai belum maksimal didalam pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak hal ini diketahui pemberian pembinaan dalam meningkatkan pengetahuan pengajaran guru pengajar belum berdasarkan tingkat pendidikan guru pengajar melainkan pemberian pembinaan secara serentak diberikan sementara guru pengajar sebagian berlaturan pendidikan PAUD dan pendidikan umum lainnya yang seharusnya pembinaan dilakukan secara berbeda berdasarkan latar pendidikan guru dan kegiatan pembinaan belum dilakukan per kuota melainkan dilakukan secara serentak sehingga kegiatan pembinaan belum dirasakan terlaksana dengan maksimal.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Penerapan kegiatan pembinaan terhadap guru pengajar yang dilaksanakan Dinas pendidikan Kota Dumai yang meliputi Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar.

- **Penetapan Waktu Kegiatan Pembinaan**

Kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanan dilaksanakan 2 kali ditetapi tahunnya kegiatan pembinaan meliputi Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar yang kami lakukan meliputi Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid hal ini dilakukan dalam 2 kali dalam setahun, memang kenyataan dilapangan kegiatan pembinaan kami lakukan hanya satu kali dalam setahun hal ini dikarenakan tugas yang padat dan kerjaan yang banyak sehingga mempersingkat waktu. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan sejauh ini kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Dumai terhadap guru pengajar taman kanak-kanak Meliputi Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun namun keyataannya hanya terlaksana 1 tahun 1 kali.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari sebagai berikut :

Kegiatan pembinaan tenaga pengajar yang kami laksanakan dilapangan sebenarnya 2 kali dalam setahun namun terlaksana 1 kali setahun hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga khusus kegiatan pembinaan tenaga pengajar dilaksanakan 1 kali setahun secara langsung akan bentuk kegiatan-kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan. (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Ibu Viana Sari, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak di laksanakan dilapangan sebenarnya 2 kali dalam setahun namun terlaksana 1 kali setahun hal ini

dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga terlihat kegiatan pembinaan belum terlaksana dengan maksimal.

Begitu juga pendapat tenaga pengajar taman kanak-kanak terkait penerapan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak. Berikut wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti sebagai berikut:

Sejauh kegiatan pembinaan yang kami terima hanya dilaksanakan satu kali meliputi kegiatan pembinaan Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid akan tetapi dari tahun sebelumnya sebenarnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Yuniarti hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penerimaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Dumai hanya dilaksanakan satu kali meliputi kegiatan pembinaan Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid.

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan tenaga pengajara taman kanak-kanak dilakukan satu kali dalam setahun padahal tahun sebelumnya dilaksanakan 2 kali setahun sehingga hal ini kegiatan pembinaan belum memberikan masukan akan kegiatan pembelajaran terhadap tenaga guru mengajar, apalagi ada sebagian guru baru yang mulai mengajar sebenarnya harus lebih maksimal diberikan kegiatan pembinaan. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Wahyuni hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar selayaknya dilaksanakan 2 kali setahun namun pada kenyataannya dilaksanakan 1 kali dalam setahun sehingga kegiatan

dirasakan pembinaan belum memberikan masukan akan kegiatan pembelajaran terhadap tenaga guru mengajar

Begitu juga hasil wawancara dengan tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati sebagai berikut:

Sejauh ini saya ikut pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang seharusnya dilaksanakan 2 kali setahun sehingga terlihat kegiatan pembinaan belum maksimal. (tenaga pengajar taman kanak-kanak dengan Ibu Riska Susilawati hari Rabu, pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Dumai hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang seharusnya dilaksanakan 2 kali sesuai dengan tahun sebelumnya sehingga terlihat kegiatan pembinaan belum maksimal.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Dumai belum maksimal dimana kegiatan pembinaan selayaknya ditetapkan 2 kali dalam setahun melainkan kenyataannya dilakukan hanya 1 kali kegiatan pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan terlihat belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Dinas pendidikan Kota Dumai dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Disiplin Guru, Materi disampaikan, Kurikulum TK, dan Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun namun pada kenyataan dilaksanakan 1 kali dalam setahun sehingga kegiatan pembinaan belum terlaksana dengan maksimal, sementara banyak guru pengajara Taman Kanak-kanak yang

baru dan sangat perlu diberikan pembinaan sehingga memiliki kemampuan didalam pengajaran.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020)

Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat 2020 belum berlangsung dengan maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat yang meliputi:

1. Efektivitas

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai terkait Pencapaian tujuan secara tepat dan arah kebijakan dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak sebagai berikut:

Efektivitas Kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar yang dilakukan belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pembinaan terhad guru pengajara taman kanak-kanak. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa diketahui Pencapaian tujuan kebijakan dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak belum terlaksana dnegan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan kegiatan pembinaan terhad guru pengajara taman kanak-kanak.

2. Efisiensi

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai terkait pencapaian hasil yang digunakan berdasarkan sumber daya Dinas Pendidikan Kota Dumai sebagai berikut:

Sejauh ini usaha pencapaian hasil yang digunakan berdasarkan sumber daya Dinas Pendidikan Kota Dumai diketahui Pegawai Dinas pendidikan Kota Dumai dalam memberikan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak belum memiliki kemampuan secara luas dalam memberikan pembinaan melalui bentuk kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Diketahui usaha pencapaian hasil yang digunakan berdasarkan sumber daya Dinas Pendidikan Kota Dumai diketahui Pegawai Dinas pendidikan Kota Dumai dalam memberikan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak belum memiliki kemampuan secara luas dalam memberikan pembinaan melalui bentuk kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran dan penetapan kurikulum Taman Kanak-kanak.

3. Kecukupan

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai terkait kebijakan dalam pelaksanaan Pembinaan tenaga guru pengajara berdasarkan kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai sebagai berikut:

Sejauh ini kebijakan dalam pelaksanaan Pembinaan tenaga guru pengajara berdasarkan kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa Belum maksimalnya kerjasama pegawai didalam kegiatan pembinaan hal ini terlihat kegiatan pembinaan hanya dilaksanakan 1 kali yang seharusnya dilakuak 2 kali dalam setahun. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,

Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Diketahui kebijakan dalam pelaksanaan Pembinaan tenaga guru pengajara berdasarkan kerjasama pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa Belum maksimalnya kerjasama pegawai didalam kegiatan pembinaan hal ini terlihat kegiatan pembinaan hanya dilaksanakan 1 kali yang seharusnya dilakuak 2 kali dalam setahun.

4. Perataan

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai terkait kebijakan dalam Perataan pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Dumai sebagai berikut:

Sejauh ini Perataan pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa belum merata kegiatan pembinaan yang diberikan bagi setiap pendidikan taman kanak-kanak di Kecamatan Dumai Barat. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Perataan pembinaan terhadap guru pengajar taman kanak-kanak berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Dumai bahwa belum merata kegiatan pembinaan yang diberikan bagi setiap pendidikan taman kanak-kanak di Kecamatan Dumai Barat.

5. Responsivitas

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman

sebagai terkait kebijakan dalam evaluasi yang dilakukan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam pencapaian kegiatan pembinaan sebagai berikut:

Sejauh ini Belum adanya evaluasi yang dilakukan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam pencapaian kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak sehingga kegiatan berlangsung seperti tahun sebelumnya. (Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Belum adanya evaluasi yang dilakukan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam pencapaian kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar taman kanak-kanak.

6. Ketepatan

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman sebagai terkait tepat sasaran didalam melakukan kegiatan pembinaan sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas Pendidikan Kota Dumai belum tepat sasaran didalam melakukan kegiatan pembinaan dimana pembinaan hanya 1 kali yang seharusnya 2 kali dan dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga pengajar, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus bapak Sulaiman, hari Senin pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Diketahui Dinas Pendidikan Kota Dumai belum tepat sasaran didalam melakukan kegiatan pembinaan dimana pembinaan hanya 1 kali yang seharusnya 2 kali dan dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan tenaga pengajar.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat 2020, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat 2020 melalui indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020) belum terlaksana dengan maksimal dimana kegiatan pembinaan ditetapkan di setiap tahunnya sebanyak 2 kali namun kenyataannya hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun dan pemberian pembinaan belum merata dilaksanakan terhadap setiap TK yang ada di Kecamatan Dumai barat dan bentuk-bentuk pembinaan terhadap Tenaga pendidik taman kank-kanak belum memberikan dampak pembenahan kemampuan guru mengajar Taman Kanak-kanak.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Dumai Barat 2020 bahwa Kurangnyak

kemampuan Pegawai Dinas pendidikan Kota Dumai dalam memberikan pembinaan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran dan penetapan kurikulum Taman Kanak-kanak, Kurangnya jumlah pegawai didalam melaksanakan kegiatan pembinaan, kurangnya kerjasama pegawai didalam kegiatan pembinaan, belum adanya kerja sama pegawai Dinas pendidikan Kota Dumai dengan Tenaga pengajar Taman kanak-kanak dalam hal kemajuan bentuk pembelajaran yang akan dikembangkan, dan belum adanya evaluasi yang dilakukan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam pencapaian kegiatan pembinaan tenaga pengajar taman kanak-kanak.

B. Saran

1. Sebaiknya Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai mengikuti pelatihan terhadap peningkatan kemampuannya dalam memberikan pembinaan terhadap Tenaga pengajar Taman kanak-kanak
2. Perlunya Penambahan jumlah pegawai dalam pembinaan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak dilapangan sehingga kegiatan pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
3. Sebaiknya pegawai melakukan kerjasama mulai dari atasan dan sampai bawahan dalam pencapaian kegiatan pembinaan.
4. Sebaiknya pegawai melakukan kerjasama dengan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak terkait upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik.

5. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Dumai melakukan evaluasi dalam pencapaian pembinaan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kemampuan guru mengajar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Damanik, Khairul Ikhwan, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta, Buku Obor.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Index
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka.
- Hidayat. 2000. *Organisasi Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ismail, Maimunah, 2001, *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur.
- Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu., 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Margono, S, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Miftha Thoha, 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen (Suatu Pendekatan Perilaku)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Moenir, H.A.S., 2001, *Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndrah, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembagunan
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Ripley, Rendal B. And Grace A. Frangklin. 1986. *Policy Implementation and Beaureaucracy, second edition*, the Dorsey Prss, Chicago-illionis
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama
- Situmorang,. Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Soeharto, Edi. 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Sukardi, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

William N Dunn, 2000. Dalam Soeharto Edisi 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, kajian Strategis, Bandung, Refika Aditama.

Widjaja, Haw, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Margoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 10173 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Tongku Rahmad Harahap
NPM : 157310601
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Taman Kanak – Kanak (Studi Di Kecamatan Dumai Barat 2020)
Persentase Plagiasi : 12 %
Jumlah Halaman : 83 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 17 Desember 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

